

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA
PEMENUHAN PUBLIC GOODS**



Disusun oleh:

Fajar Alfatkurohman Wahid

2266041002

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Pelayanan publik bisa berupa layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, dan banyak lagi. Pentingnya pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pelayanan publik memiliki fungsi untuk memberikan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Terutama dalam bidang pendidikan, Kesehatan, administrasi dan lain-lain (Syuhada, 2015). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, dalam Pedoman umumnya dikatakan bahwa, Pelayanan Publik merupakan kegiatan pelayanan yang Dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan Penerima layanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik Menjadi sebuah isu besar dalam kebijakan yang tertata dan strategis karena sebuah Penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan sebuah perwujudan sebuah kinerja Organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) masuk Dalam sektor pelayanan administrasi karena melibatkan pelayanan masyarakat yang diberikan Secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintahan dalam sektor perizinan dan non perizinan. Administrasi hanya berfungsi menerima dokumen permohonan izin dan non izin serta Mengembalikan dokumen yang telah usai diproses kepada pemohon.

Namun, belum memiliki Kewenangan untuk memproses dan penandatanganan izin/non izin tersebut. Kewenangan Tersebut masih tersebar di dinas teknis terkait. Kondisi lainnya yang ditemui adalah banyaknya Pemohon yang langsung ke dinas sektoral (tidak ke PTSP) untuk mengambil izin yang telah Selesai diproses, meskipun

permohonan izin masuk melalui PTSP. Dinas sektoral dapat Membuka kontak dengan para pemohon melalui kegiatan tinjauan lapangan atau melalui nomor Kontak pemohon yang tertera pada biodata. Akibatnya, kontak antara pemberi izin dan pemohon Sulit diminimalisir serta mempersulit pencatatan administrasi jumlah izin yang dikeluarkan pada Wilayahnya

Pelayanan publik merujuk pada berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang mencakup pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, hukum, perpajakan, perizinan, dan banyak lagi. Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Pelayanan publik dapat disediakan oleh berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan melibatkan berbagai lembaga seperti sekolah, rumah sakit, polisi, dan banyak lagi. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, pelayanan publik juga mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam penyediaan layanan. Ini berarti pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan fisik, tetapi juga tentang menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan integritas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pelayanan publik adalah salah satu aspek penting dari tugas-tugas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan mendukung perkembangan masyarakat. Pelayanan publik adalah segala jenis layanan, tindakan, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, atau kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memberikan manfaat kepada warga negara, menjalankan fungsi pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Pelayanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perizinan usaha, perpajakan, keamanan, dan banyak lagi. Mereka dapat disediakan oleh berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga

pemerintah daerah, serta melibatkan berbagai lembaga dan departemen pemerintah. Aspek penting dari pelayanan publik adalah keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam penyediaan layanan. Ini berarti pelayanan publik harus dikelola secara profesional, integritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Pelayanan publik juga merupakan bagian integral dari tugas-tugas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung perkembangan masyarakat yang lebih baik. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak dan kebutuhan warga negara terpenuhi dengan baik.

Public goods adalah jenis barang atau layanan yang memiliki dua karakteristik utama yaitu Non-Eksklusif: Ini berarti bahwa individu atau anggota masyarakat tidak dapat dikecualikan dari penggunaan public goods ini. Jika public goods tersedia untuk satu orang atau kelompok, maka biasanya juga tersedia untuk semua orang. Sebagai contoh, cahaya jalan umum adalah public goods; semua orang yang berada di sekitarnya dapat menikmati manfaatnya tanpa bisa dikecualikan. Dan Non-Rival: Public goods juga bersifat non-rivalrous, yang berarti penggunaan oleh satu individu atau kelompok tidak mengurangi ketersediaan atau manfaatnya bagi individu atau kelompok lainnya. Contohnya, udara bersih adalah public goods; satu orang yang menghirup udara bersih tidak membuat udara menjadi lebih sedikit bagi orang lain.

Public goods seringkali menjadi perhatian dalam ekonomi karena mereka memiliki sifat yang membuat mereka rentan terhadap masalah “free rider,” di mana individu atau kelompok bisa menikmati manfaat public goods tanpa membayar atau berpartisipasi dalam pembiayaannya. Karena itu, pemerintah sering kali terlibat dalam penyediaan atau pengaturan public goods untuk memastikan bahwa mereka tetap tersedia untuk masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Latar belakang implementasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan public goods dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah seringkali memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan mengelola pelayanan publik secara efisien untuk memaksimalkan manfaat public goods.

2. Kesejahteraan Masyarakat: Public goods seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi yang baik dari pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk.
3. Pembangunan Ekonomi: Public goods yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jaringan transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan peluang ekonomi.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan: Implementasi yang efektif dari pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan yang lebih baik, dan akses yang lebih mudah ke fasilitas umum.
5. Peningkatan Kepatuhan Hukum: Memenuhi public goods juga dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakpatuhan hukum. Misalnya, dengan menyediakan air bersih yang cukup, masyarakat mungkin lebih cenderung mematuhi peraturan mengenai penggunaan air.
6. Tanggung Jawab Pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal public goods. Implementasi yang baik dari pelayanan publik adalah cara untuk menjalankan tanggung jawab ini.
7. Peningkatan Kapasitas Institusi: Implementasi pelayanan publik yang efisien juga dapat membantu meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek public goods.

Latar belakang ini menunjukkan bahwa pemenuhan public goods melalui implementasi pelayanan publik adalah langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pengurangan nilai publicness dari lembaga-lembaga publik di Indonesia menjadi Fenomena tersendiri. Isu efisiensi dan way of work dari institusi makro di sektor publik yang Bermasalah selalu mengemuka bila menyinggung reduksi penyediaan public goods dalam Pemenuhan public needs. Penyediaan public goods adalah kewajiban

negara, namun Kenyataannya barang publik serupa yang disediakan swasta memiliki kualitas dan pelayanan Yang lebih baik. Misalnya saja, kualitas dan kapasitas tempat tidur yang disediakan rumah Sakit swasta jauh lebih baik dan lebih banyak. Dari tahun ke tahun daya tampung perguruan Tinggi swasta juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Apalagi Masyarakat dengan kemampuan daya beli yang lebih, membutuhkan pelayanan dan kualitas Barang publik yang tinggi.

Pada tahap ini, peluang yang diberikan negara terhadap swasta dalam penyediaan barang publik tidak menjadi masalah. Masyarakat jadi memiliki lebih Banyak opsi dalam memilih barang publik yang mereka inginkan. Namun jika swasta sudah mendominasi atau menguasai penyediaan barang publik padahal senyatanya penyediaan itu Seharusnya dilakukan sepenuhnya oleh negara, maka ini yang menjadi masalah. Negara tidak Cukup hanya menjadi pengatur atau pengawas penyediaan barang publik. Negara tidak bisa Menjadikan dalih efisiensi untuk mereduksi peran kepublikannya dengan memberikan ruang Yang terlalu luas bagi pasar.

Walaupun barang publik tidak selalu diartikan sebagai barang yang diproduksi Oleh Pemerintah, namun pada awalnya karena sifat barang publik yang unik, ia menjadi tidak Mungkin dialokasikan ke dalam mekanisme pasar. Sebagai contoh sistem hukum, pertahanan Nasional, pemerintahan, marka jalan, lampu lalu lintas dan sebagainya. Kemudian negara Dalam prakteknya tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis karena Kebijakan yang nantinya dikeluarkan harus benar-benar didasarkan respon atas public affairs Dan perwujudan public needs, sehingga tidak mungkin di satu sisi mengizinkan negara Bergelut dengan kalkulasi profit karena negara tidaklah sama dengan perusahaan besar. Begitupun sebaliknya bahwa seorang pengusaha tidak bisa menjadi seorang pemberi Formulasi dalam kebijakan ekonomi (Krugman, 2010).

Karena sifat barang publik yang unik inilah maka muncul dua alasan mengapa Sebaiknya barang publik penyediaannya dilakukan oleh Pemerintah, yang pertama yaitu tidak boleh ada unsur persaingan dalam mendapatkan barang publik. Masyarakat seharusnya Diberikan keleluasaan dalam memperoleh atau menggunakan barang publik. Dalam Mengkonsumsi barang publik, seseorang tidak berhak menghalangi orang lain untuk ikut Mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan

masyarakat terhadap barang Publik. Masyarakat tidak boleh mengeluarkan sejumlah uang dalam memanfaatkan barang Publik yang tersedia. Penghargaan masyarakat terhadap kualitas penyediaan barang publik Dapat diukur dengan tingkat kepuasan dalam penggunaannya dan sejauh mana kesadaran Masyarakat untuk ikut menjaga dan memilikinya. Misalnya dalam pemanfaatan ruang Terbuka hijau (RTH). Intensitas pengunjung yang datang setiap hari dapat menunjukkan Tingkat kepuasan pengunjung atas tempat tersebut serta kesadaran masyarakat untuk ikut Menjaga kebersihan dan kenyamanannya juga merupakan suatu penghargaan yang tidak Dapat dinilai dengan uang. Pembatasan atas kegunaan dan manfaat suatu barang publik dapat Mengurangi total kesejahteraan masyarakat yang ingin menikmatinya.

Institusi publik di tengah masalah kelembagaan, sistem manajemen dan pengaruh Politik yang ada menjadi penyebab inefisiensi dan terhambatnya optimalisasi pelayanan Publik. John T. Dunlop menggambarkan sepuluh aspek organisasi manajemen publik (Lane, 1986). Aspek-aspek ini yang menjadi kendala dalam mencapai efisiensi dan produktivitas Kebanyakan organisasi publik, sebagai berikut:

1. Perspektif Wakt

Institusi publik di Indonesia tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh politik lima Tahunan. Secara praktek, target-target kegiatan yang disusun oleh beberapa institusi Publik akan sulit tercapai hanya dalam tempo sesingkat itu. Sebagai contoh, agenda Reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru sedikit terasa efek baiknya bagi pelaksanaan Birokrasi di daerah tapi sudah dibatasi oleh kalender politik lima tahunan.

2. Lamanya Menjabat

Kalender politik lima tahunan juga membatasi masa kerja pejabat tinggi dan pimpinan Pada organisasi publik. Padahal banyak agenda-agenda reformasi yang tidak bisa Dilaksanakan hanya dalam tempo lima tahun. Kendalanya bila pejabat setelahnya Memiliki visi dan misi yang berbeda, maka agenda itu akan terhenti begitu saja.

3. Ukuran Keberhasilan

Sangat sulit menentukan indikator keberhasilan pimpinan organisasi publik. Indikator Keberhasilan saat ini hanya didasarkan pada serapan anggaran, yang justru tidak sedikit Masuk ke kantong-kantong individu.

4. Kendala Kepegawaian

negeri lebih tidak bisa diharapkan untuk bekerja lebih efisien, produktif, dan Jujur, sedangkan yang ada di pikirannya hanya bertahan hidup dengan gaji yang kecil.

5. Kesamaan dan Efisiensi.

Di sektor publik tekanan lebih diberikan kepada peningkatan kesamaan manfaat dari Suatu program publik untuk berbagai kelompok masyarakat.

Kendala utama penyediaan barang publik oleh negara adalah masalah efisiensi dan Akuntabilitas. Penyediaan barang publik oleh negara yang tidak efisien menjadi legitimasi Masuknya pihak swasta untuk ikut serta dalam penyediaannya. Keterbatasan anggaran yang Dimiliki oleh pemerintah sering menjadi masalah dalam penyediaan barang publik. Keterbatasan ini menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan barang publik secara Optimal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat (Spackman, 2002).

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses implementasi pelayanan publik berkontribusi dalam pemenuhan public goods?
- 2) Apa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya tersebut?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses implementasi pelayanan publik berkontribusi dalam pemenuhan public goods?
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam upaya tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

Al Annas, S. N. N., Indasah, I., Yudhana, A., & Sodik, M. A. (2018). *Analysis of Using Basic Material and Process on Organoleptic Result of Tempe Chips in Ngantru Trenggalek*. Indonesian Journal of Nutrition Epidemiology and Reproductive, 1(1), 46-55.

Attoriq, S., & Sodik, M. A. (2018). *Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Di Lahan Praktik*.

Azwar, S. (2012). *ANALISIS KARAKTERISTIK AITEM TES UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DENGAN TEORI TES KLASIK DAN TEORI RESPON AITEM* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)

Edinal Sanif. Dr. Tekanan Darah, Apanya Yang ditekan
http://www.jantunghipertensi.com/index.php?Option=com_content&task=view&id=186&Itemid=9, 24-02-2010

Kemenkes RI (2010), Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pusat Promosi Kesehatan RI, Jakarta

McGowan, MD. M (2001), *Menjaga Kebugaran Jantung*, Rajagrafindo

Persada, Jakarta. Medicastore. Com, Arteriosklerosis (Atherosclerosis).
<http://medicastore.com> Penyakit/137/Atherosclerosis Atherosclerosis.html, 24-02-2010

Oktoriani, E. N., Sutrisno, J., Mayasari, E., & Sodik, M. A. (2018). *Analysi Of Medical Record Complete Flexibility to Complete Claims of Healtg BPJS RS Baptis Kota Batu*. Journal of Global Research in Publik Health, 3(1), 46-53.

Setyani, A. T., & Sodik, M. A. (2018). *Pengaruh Merokok Bagi Remaji Terhadap Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari*. Sodik, M. A., & Nzilibili, S. M. M. (2017). *The Role Of Health Promotion*

Bozeman, Barry. 1987. *All Organization are Public : Bridging Public and Private Organizational Theories*. San Francisco : Jossey Bass

Fukuyama, Francis. 2004. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Qalam.

Habermas, Jurgen. 2012. *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta : Kreasi Warna.

Haque, M. Shamsul. 2001. *The Diminishing Publicness of Public Service Under The Current Mode of Governance*. *Public Administration Review*. Vol. 61 (1). Hal. 65-82.

Krugman, Paul. 2010. *Negara Bukan Perusahaan : Mengapa Kebijakan Ekonomi Tidak Bisa Dirumuskan oleh Pengusaha*. Tangerang : Marjin Kiri.

Lane, Frederick S. 1986. *Current Issues in Public Administration (third edition)*. New York : St. Martin's Press.

Murti, Bhisma. 2003. *Intervensi Pemerintah Dalam Ekonomi Campuran : Penyediaan Public Goods dan Pengaturan Private Goods di Sektor Kesehatan*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Vol. 06 (4). Hal. 167- 175.

Pesch, Udo. 2008. *The Publicness of Public Administration*. *Administration and Society*. Vol. 40 (2). Hal. 170-193.

Spackman, Michael. 2002. "Public-private partnerships: lessons from the British approach". *Economic Systems*. Vol. 26. Hal. 283-301.

